

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 1

SUBBAGIAN HUMAS



Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak
Media Online	Media Indonesia

Wilayah: Kabupaten Klaten

4.050 Guru Tidak Tetap di Klaten Terima Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan

<https://mediaindonesia.com/nusantara/449806/4050-guru-tidak-tetap-di-klaten-terima-tunjangan-peningkatan-kesejahteraan>

SEBANYAK 4.050 guru tidak tetap/pegawai tidak tetap (GTT/PTT) K2 dan GTT/PTT non-K2 Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menerima tunjangan program peningkatan kesejahteraan.

Tunjangan peningkatan kesejahteraan GTT/PTT K2 dan non-K2 Kabupaten Klaten, diserahkan secara simbolis oleh Bupati Sri Mulyani di Pendopo Pemerintah Kabupaten Klaten, Jumat (26/11).

Plt Kepala Dinas Pendidikan Klaten, Yunanto, melaporkan anggaran program peningkatan kesejahteraan GTT/PTT K2 dan GTT/PTT non-K2 total sebesar Rp15,319 miliar dari APBD Perubahan 2021.

GTT/PTT penerima uang peningkatan kesejahteraan semester II tahun ini total sebanyak 4.050 orang. Jumlah itu terdiri dari GTT/PTT K2 sebanyak 1.311 orang, dan 2.739 orang GTT/PTT non-K2.

Uang peningkatan kesejahteraan GTT/PPT K2 Rp1.000.000 per bulan, GTT/PTT non-K2 dengan masa kerja 1-3 tahun Rp330.000, dan masa kerja 4-6 tahun Rp400.000.

Kemudian, GTT/PTT non-K2 masa kerja 7-9 tahun Rp450.000, masa kerja 10-12 tahun Rp500.000, dan masa kerja 13 tahun ke atas Rp550.000 per bulan.

Menurut Yunanto, pencairan tunjangan GTT/PTT semester II ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan GTT/PTT. Diharapkan, dalam bertugas mereka lebih profesional dan berintegritas.

"Selain itu, untuk mempercepat mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati, yakni Klaten keren, maju, mandiri, dan sejahtera," ujarnya.

Dalam sambutannya Bupati Sri Mulyani mengatakan, uang peningkatan kesejahteraan GTT/PTT K2 dan non-K2 setiap tahun dianggarkan melalui APBD Kabupaten Klaten.

"Tetapi, mohon maaf apa yang kami berikan belum sesuai harapan atau keinginan GTT/PTT. Karena, potensi APBD dan keuangan daerah sangat terbatas di masa pandemi covid-19," jelasnya.

Peran GTT/PTT, lanjut Sri Mulyani, sangat membantu Pemkab Klaten dalam upaya mencerdaskan anak didik. Karena itu, GTT/PTT akan diperjuangkan bisa diangkat CPNS. (N-2)